

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KLAIM ASURANSI**

**USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**

**(Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Syanti Hardiyanti**

**NPM : 1521030505**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KLAIM ASURANSI**

**USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**

**(Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Syanti Hardiyanti**

**NPM : 1521030505**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440/2018 M**

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syanti Hardiyanti

NPM : 1521030505

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ( Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2019  
Penulis



Syanti Hardiyanti  
1521030505



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KLAIM ASURANSI**  
**USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**  
**(Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**

**Oleh**  
**Syanti Hardiyanti**

Produk asuransi di era sekarang tidak hanya diperuntukan untuk manusia atau jiwa saja tetapi sudah lebih luas sampai kepada asuransi hewan (Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)), asuransi ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan Jasindo. Jasindo atau Jasindo Agri merupakan suatu bentuk perlindungan kepada Para Petani, Peternak dan Nelayan agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani, peternak dan usaha penangkapan ikan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Untuk itu belakangan ini asuransi tidak hanya di peruntukan untuk manusia atau jiwa saja tetapi sudah lebih luas sampai kepada asuransi hewan (Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung? dan bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang sistem klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam dengan adanya asuransi usaha ternak sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem klaim asuransi usaha ternak sapi jika sapi tersebut mati atau hilang, mekanisme pelaksanaan atau prosedur pengajuan klaim asuransi usaha ternak sapi itu sama saja, hanya saja yang membedakannya dalam persyaratan yang harus dipenuhi tertanggung (peternak sapi) untuk mengajukan klaim asuransi usaha ternak sapi. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung adalah boleh (mubah) karena peternak sangat merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan dari adanya sistem klaim asuransi ini. Saran-saran dalam penelitian ini, hendaknya perusahaan lebih meningkatkan kredibilitas dan pelayanan dalam menyampaikan informasi kepada peternak (nasabah) dan kokter (koordinator kelompok ternak) harus jujur dan amanah dalam memberikan informasi dan klaim asuransi tersebut, sehingga klaim tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Syanti Hardiyanti**  
NPM : **1521030505**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syariah**  
Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KLAIM  
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) (Studi di PT  
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

**NIP. 196201111994031001**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung"**. Oleh: **Syanti Hardiyanti**, NPM: **1521030505**, Jurusan: **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu, 14 Agustus 2019**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

**Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



**H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210219930310002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. al-Hasyr [59]:18).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: spesial for woman*, (Jakarta: Syaamil, 2007), Q.S. al-Hasyr [59]:18.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirohim*, Atas rahmat, ridho dan karunia dari Allah SWT., Allhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur kepada-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan serta keluasan dalam berpikir, ku persembahkan karya kecil ku ini sebagai tanda cinta, sayang, dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku, Ayahanda Jalaludin dan Ibunda Rasmawati yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi, dan menyanyagiku serta untuk segala pengerbonan yang menghantarkan ananda mu pada titik ini, yang ananda tidak bisa balas dengan apapun jua.
2. Kedua kakak tersayang (Rini Harmiyati dan Adi Kusuma) yang selalu mau direpotkan serta yang selalu memberikan semangat kepada ku dalam kondisi apapun dan yang selalu mau direpotkan, juga kepada kakak iparku (Samsul Hidayat) terimakasih untuk semangat yang diberikan kepada ku, serta untuk kedua Ponakanku (Della Agta Viani dan Rabbani Assegaf) yang selalu menjadi semangat untuk menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah turut ajar dalam mendidik dan mengajarkan ku dalam berpikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Syanti Hardiyanti, dilahirkan pada hari Senin tanggal 04 November 1996 di Purawiwitan, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat, Putri ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jalaludin dan Ibu Rasmawati.

Jenjang Pendidikan dimulai :

1. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Purawiwitan, pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009.
2. Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Kebun Tebu, pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2012.
3. Pendidikan Menengah Atas di SMK Negeri 01 Kebun Tebu, masuk tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Pendidikan kejenjang yang tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT., karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)” ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhamad SAW., keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Aamiin.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang dari awal banyak mengarahkan dalam kuliah dan belajar menjadi lebih baik, serta yang sudah meluangkan waktunya membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Khoiruddin, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.



6. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan Strata 1 (S-1) ku.
7. Pimpinan serta staff karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung yang telah memberikan izin serta sudah diterima dengan penuh kehangatan selama melakukan penelitian disana, tanpa izin bapak dan ibu skripsi ku tidak akan dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat ku dikosan (Lia Fatimah Junifer, Yunita Rusmawati, Maria Isnaini, Depi Puspita, Meysita Yola, Nety Mistasari, dan Indah Meriyani), sahabat-sahabat di Organisasi (Endah Wartini, Eka Apriani dan Tri Lukito), sahabat-sahabat selama dikelas (Devi Septiana, Arista Tri Hastuti dan Eni Fitriana), serta Sahabat di bangku sekolah (Ari Yunita, Diani Pratiwi dan Nur Sholeha) yang selalu memberikan semangat, motivasi, menghibur, mengingatkan serta menasehatiku.
9. Rekan-rekan Muamalah angkatan 2015 terkhusus rekan-rekan Muamalah H angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan, perjuangan dan kekeluargaan selama 4 tahun ini, teman-teman KKN 2018 kelompok 72, teman-teman kompre serta teman-teman PPS kelompok 3 Pengadilan Agama Metro Kelas A 1 terimakasih untuk semangat yang telah kalian berikan kepadaku.

Serta untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Terimakasih. Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah memberikan

imbalan dengan pahala yang setimpal. Aamiin. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kiranya saran dan perbaikan dari manapun datangnya sangat diharapkan guna melengkapi dan memperbaiki tulisan ini.

Bandar Lampung, Agustus 2019  
Penulis

Syanti Hardiyanti  
Npm. 1521030505





## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Asuransi Konvensional .....	17
1. Pengertian Asuransi Konvensional .....	17
2. Sejarah Asuransi Konvensional .....	19
3. Dasar Hukum Asuransi Konvensional .....	22
4. Jenis-jenis Asurani .....	24
5. Asuransi Sosial ( <i>Social Insurance</i> ) .....	27
B. Asuransi Syariah .....	29
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	29
2. Sejarah Asuransi Syariah .....	32
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	35

4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	44
5. Akad dan Produk Asuransi Syariah .....	49
6. Sistem Klaim Asuransi Syariah .....	53
7. Pandangan Ulama tentang Asuransi Syariah.....	58
8. Pertanggungjawaban Asuransi Syariah.....	66
C. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....	67
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... ..	74
B. Gambaran Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia(Persero) KC Bandar Lampung .....	83
C. Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung .....	93
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung jika sapi .....	96
B. Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Blangko Konsultasi Skripsi .....	1
Lampiran 2: Permohonan Izin Riset .....	3
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian .....	4
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung .....	5
Lampiran 5: Panduan Interview Informen .....	6
Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	7
Lampiran 7: Surat Keterangan Wawancara .....	8
Lampiran 8: SK Bimbingan Skripsi Mahasiswa .....	39



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Asuransi Konvensional .....	17
1. Pengertian Asuransi Konvensional .....	17
2. Sejarah Asuransi Konvensional .....	19
3. Dasar Hukum Asuransi Konvensional .....	22
4. Jenis-jenis Asurani .....	24
5. Asuransi Sosial ( <i>Social Insurance</i> ) .....	27
B. Asuransi Syariah .....	29
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	29
2. Sejarah Asuransi Syariah .....	32
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	35

4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	44
5. Akad dan Produk Asuransi Syariah .....	49
6. Sistem Klaim Asuransi Syariah .....	53
7. Pandangan Ulama tentang Asuransi Syariah.....	58
8. Pertanggungjawaban Asuransi Syariah.....	66
C. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....	67
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... ..	74
B. Gambaran Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia(Persero) KC Bandar Lampung .....	83
C. Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung .....	93
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung jika sapi .....	96
B. Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami istilah-istilah yang ada di dalam judul ini agar mendapatkan gambaran yang jelas, rinci dan memudahkan dalam Proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penjelasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan proposal tersebut. Adapun Judul Proposal ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**”. Untuk mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam judul tersebut, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** merupakan hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>1</sup>. Atau Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.<sup>2</sup>
2. **Hukum Islam** merupakan tuntunan, tuntutan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma Sahabat.<sup>3</sup>
3. **Sistem** adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>4</sup> Sistem disini

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470

<sup>2</sup> Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1076

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Usul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.51

maksudnya adalah sistem atau tata cara memperoleh klaim asuransi usaha ternak sapi.

4. **Klaim** adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak mendapatkan atau memiliki atas sesuatu adapun klaim dalam asuransi adalah hak peserta asuransi yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>5</sup>
5. **Asuransi** adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk; memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayara yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan data. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).<sup>6</sup>
6. **Ternak** adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, sapi dsb) untuk dibiakan dengan tujuan produksi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h.1320

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 198

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h.1454

7. **Sapi** adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang dalam penelitiannya dilakukan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, Perkembangan teknologi disegala bidang mengalami kemajuan yang semakin pesat, begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti asuransi yang sudah banyak bermunculan, yang awalnya asuransi hanya bergerak dalam bidang kesehatan, jiwa, pendidikan, dan umum (kendaraan). Kini asuransi sudah mulai meluas sampai kepada asuransi untuk para petani, peternak, dan nelayan. Mengingat asuransi tersebut terbilang baru, dan bagaimana prakteknya khususnya sistem klaimnya yang apabila hewan yang diasuransikan mati atau hilang, maka penelitian ini sangat menarik untuk diteliti.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.1225

## 2. Alasan subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan:

- a. Pembahasan judul ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Adanya literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang diteliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

### C. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat memperhitungkan seperti kematian dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.<sup>9</sup>

Risiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit, kerugian atau risiko dipecat dari pekerjaan. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.291



datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko kematian dan lain sebagainya adalah perusahaan Asuransi.<sup>10</sup>

Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (*timbal balik*), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau mungkin memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>11</sup>

Kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.292

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2012), h.237-238

asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat itu.<sup>12</sup> Sedangkan perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk terlambat dibandingkan dengan perkembangan asuransi syariah diluar negeri, sehingga perkembangan asuransi syariah dimasa yang sekarang dan mendatang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia.<sup>13</sup>

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada satu ayatpun yang secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada di dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang.<sup>14</sup>

Hal ini dapat di perhatikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>12</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, h. 293

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, h.245

<sup>14</sup> *Ibid.*,

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah (5):2).*<sup>15</sup>

Ayat di atas membuat perintah tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berasuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.<sup>16</sup>

Kemudian dalam Al-Qur'an surat At- Taghabun (64) ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. (Q.S At-Taghabun (64):11).*<sup>17</sup>

Ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah SWT. Dalam kaitannya dengan asuransi adalah

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: spesial for woman*, (Jakarta: Syaamil, 2007), h. 106

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, h.246

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.557

diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*Proteksi*) jiwa dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.<sup>18</sup>

Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya:

*“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.*<sup>19</sup>

Perkembangan asuransi di Indonesia sudah sangat maju di iringi dengan kemajuan teknologi yang juga maju semakin pesat. Perusahaan-perusahaan asuransi sudah sangat banyak di Indonesia seperti: PT AIA Finacial, Allianz, AXA Mandiri Prudential dan masih banyak lagi lainnya begitu pula dengan perusahaan Asuransi Syariah (*Takaful*). Tetapi hampir semua banyak nya asuransi tersebut adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Melihat itu Asuransi Jasindo yang bekerjasama dengan BUMN mengeluarkan Asuransi Jasindo Agri yang merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para Petani, Peternak dan Nelayan agar mendapatkan Kenyaman dan Keamanan dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani, peternak dan usaha penangkapan ikan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Untuk itu belakangan ini asuransi tidak hanya di

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, h.247

<sup>19</sup> *Ibid.*,



peruntukan untuk manusia atau jiwa saja tetapi sudah lebih luas sampai kepada asuransi hewan (Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)).

Pengasuransian hewan atau sapi tersebut cukup daftarkan sapi ke kantor UPT Puskeswan (Pusat kesehatan hewan) sedangkan pembayaran preminya bisa melalui Bank yang bekerjasama dengan PT Asuransi Usaha Ternak Sapi. Premi asuransi sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,-/ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,-/ekor/tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp. 160.000,-/ekor/tahun dan sisa swadaya peternak sebesar 20% atau Rp 40.000,-/ekor/tahun.

Kriteria sapi yang bisa di asuransikan adalah:

1. Peternak sapi yang sedang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan;
2. Sapi betina dalam keadaan sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
3. Peternak sapi skala usaha kecil , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan sapi yang di asuransikan adalah:

1. Sapi harus memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag, necktag, micro-chip* atau lainnya);
2. Peternak sapi harus bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari premi yang telah ditetapkan perundang-undangan atau asuransi pelaksana; dan

3. Peternak sapi harus bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi yang telah diberikan oleh asuransi pelaksana.

Apabila, jika sapi yang sudah diasuransikan ternyata mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, dan mati karena beranak maka akan mendapatkan dana pengganti sebesar 10 juta dan untuk sapi hilang karena kecurian maka mendapatkan pengganti 7 juta.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini merupakan asuransi yang baru dan banyak dari masyarakat yang belum mengetahuinya, dan Asuransi ini juga merupakan Asuransi yang bergerak di bidang Asuransi Konvensional untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, bagaimana sistem klaim asuransi usaha ternak sapi dan bagaimana asuransi usaha ternak sapi menurut hukum islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung ?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui cara mendapatkan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoritis,

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) kepada masyarakat pada umumnya, dan usaha ternak sapi khususnya, terkait adanya asuransi usaha ternak sapi sehingga para ternak sapi merasa terjamin sapinya dengan adanya asuransi tersebut.

2. Untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian ini akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

- b. Secara Praktis, bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas syariah dan masyarakat luas.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data dari lapangan (*Fielded Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.<sup>20</sup> Dalam hal ini data bersumber dari organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang asuransi.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dimana penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari Lembaga Asuransi Jasindo sebagai Lembaga Asuransi yang mengeluarkan produk Asuransi Usaha Ternak Sapi.

<sup>20</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1

<sup>21</sup> Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian* (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.4

<sup>22</sup> Sugino, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 215



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>23</sup> Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai kaitan dan relevansi dengan permasalahan dan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini jumlah populasi 296 yang terdiri dari 290 peternak yang pernah melakukan klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS), dari 15 kabupaten kota, selama 1 tahun (2018) dan 6 pegawai Asuransi Jasindo yang bekerja di bagian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>25</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari seratus (100) lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat menggunakan sampel,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 218

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 119

menurutnya sampel diambil antara 10-15% hingga 20-25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.<sup>26</sup> Mengingat jumlah populasi lebih dari 100 orang maka diambil sampel 10-15%, penyusun mengambil 10% dari 296 orang yaitu 30 orang. Dalam pelaksanaannya penelitian ini, menggunakan random sampling (sampel acak) yaitu sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar, yaitu dari pegawai asuransi jasindo dan peternak yang pernah melakukan klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>27</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati berapa banyak peternak sapi yang sudah pernah melakukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) tersebut.

##### b. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>28</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara kepada Asuransi Jasindo dan

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Cet.13 h. 139

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.52

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.55

peternak sapi yang pernah melakukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Atau dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Plaksana dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>30</sup> Tujuan nya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pencatatan atau hasil penelitian dan bersifat koreksi sehingga kekurangan nya dapat diperbaiki dan dilengkapi.

b. Sistematika Data (*sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.69

<sup>30</sup> Suharsimi Arikounto, *Op.Cit.*, h. 115

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010), h. 126.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menguraikan dan menilai data hasil penelitian.<sup>33</sup>



---

<sup>32</sup> Sugino, *Op. Cit.*, h.334.

<sup>33</sup> Susiadi AS, *Op. Cit.*, h.132



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi Konvensional

##### 1. Pengertian Asuransi Konvensional

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureede*” yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Asuransi bahasa Latin disebut “*assecurare*” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya asuransi dalam bahasa Inggris disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>1</sup>

Menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzekeer voonal*).<sup>2</sup>

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah Perjanjian antara dua

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010). Cet.1 h.151

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 152

belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa asuransi atau pertanggungan menurut rumusan pasal diatas dapat dikemukakan bahwa asuransi adalah suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Risiko merupakan:

- a. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi; dan
- b. Peristiwa yang dimungkinkan terjadi, keadaan ini biasanya disebut sebagai kehilangan, penurunan atau pemusnahan nilai ekonomis.<sup>4</sup>

Menurut William dan Heins yang dikutip dalam bukunya Muhammad Syakir Sula, ada dua pengertian yang diambil dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemegang polis dan sudut pandang perusahaan asuransi.

Sudut pandang pertama yaitu dari pemegang polis, menurutnya potensi terhadap kerugian finansial dimana kerugian tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (*insurer*).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 80

Adapun dari sudut pandang yang kedua yaitu perusahaan asuransi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan dana yang berasal dari individu-individu atau dari perusahaan yang mengasuransikan dirinya dan dari dana itulah klaim mereka akan dibayarkan. Jadi, asuransi menurut perusahaan asuransi merupakan penyimpanan (*retention*) dan *combination device*.<sup>5</sup>

Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian kedua belah pihak yaitu antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung menerima pembayaran premi yang dikeluarkan oleh tertanggung. Dan penanggung berjanji mengeluarkan atau membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang atau kepentingan lainnya yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah Asuransi Konvensional

Secara historis “asuransi” telah dikenal sejak zaman dahulu. Ini dikarenakan nilai dasar dari konsep “asuransi” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sudah sejak lama dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu

---

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit.*, h.152

<sup>6</sup> *Ibid.*,

cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir'aun berkuasa.

Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama tujuh tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa peceklik selama tujuh tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Fir'aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada tujuh pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa peceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.<sup>7</sup>

Pada Tahun 2000 sebelum Masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk Collegia Tennirium, yaitu semacam lembaga asuransi yang tujuannya membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yaitu Collegia Nititum, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan Kerajaan Romawi.<sup>8</sup>

Pada zaman Alexender Agung (336-323 sebelum Masehi) ada usaha manusia yang mirip asuransi, yaitu upaya dari beberapa kota praja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Nominal uang pinjaman diberikan sekaligus kepada kota praja oleh yang meminjamkan, misalnya 6000 *drachmen*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 155

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit.*, h.156

- b. Setiap bulan kota praja membayar sejumlah 50 *drachmen* kepada yang meminjamkan uang sampai yang meminjam wafat.
- c. Ketika wafat, kepada ahli warisnya atau keluarganya, kota praja akan memberikan 200 *drachmen* untuk biaya pemakaman.<sup>9</sup>

Pada zaman pertengahan, di Exeter Negeri Inggris, ada kebiasaan di antara para anggota suatu “glide” (perkumpulan dari orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti para tukang batu, tukang kayu, pembuat roti) dijanjikan bahwa apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana kepunyaan “glide” tersebut.<sup>10</sup>

Islam dalam konsepnya dikenal dengan konsep “*aqilah*”. Aqilah adalah bertanggung jawab atau saling memikul beban untuk keluarganya. Jika salah satu dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut ‘*aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz*) yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak sengaja.<sup>11</sup>

Menurut Yusuf al-Subaily, asuransi pertama kali muncul dari yaitu asuransi laut pada abad ke-14 Masehi di Italia. Saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung risiko yang dihadapi oleh

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 82

<sup>11</sup> *Ibid.*,



kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.<sup>12</sup>

Setelah tiga abad, maka muncullah asuransi darat yang awalnya berbentuk asuransi kebakaran yang cukup besar di London pada Tahun 1666 membakar lebih dari 13.000 rumah. Kemudian pada abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, seiring dengan berevolusinya industri dan meningkatnya risiko tenaga kerja serta banyaknya alat industri, muncullah bentuk asuransi yang lain seperti asuransi per orang yang mengansuransikan dirinya dari suatu bahaya yang mungkin menimpa hartanya dan jiwanya dari kecelakaan ataupun kematian atau yang lainnya.<sup>13</sup>

### 3. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia, di antaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- c. PP No. 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.83

<sup>13</sup> *Ibid.*,

- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- h. Surat Keputusan Biro Tarif No. SK-03/BT/97 tentang Perubahan Tarif (Suku Premi) Asuransi Kebakaran Atas Objek-objek yang Tergolong “Industri Risk” dan “Non Industri Risk”.
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berapa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri.
- j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.4/1995 Tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri.
- k. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 Tanggal 5 April 1995 tentang Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 11 Juli 1995.
- l. Salinan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangi sebagai Biaya.
- m. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE;20/PJ.4/1995 Tanggal 26 April 1995 tentang Besarnya Cadangan yang Boleh di bebaskan sebagai Biaya (Seri PPh Umum No. 8).

- n. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- o. Keputusan Menteri Keuangan RI No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- p. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.<sup>14</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Asuransi

Perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, adalah sebagai berikut:

##### a. Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

##### b. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.83-85

c. Reasuransi

Reasuransi yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.<sup>15</sup>

Adapun ruang lingkup perjanjian pertanggungan menurut masing-masing jenis asuransi adalah :

- a. Perusahaan asuransi kerugian, kegiatannya yaitu; hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian, dan juga termasuk reasuransi;
- b. Asuransi jiwa, kegiatannya yaitu; menyelenggarakan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri dan anuitas; dan
- c. Reasuransi hanya sebatas pertanggungan kembali atau pertanggungan ulang.<sup>16</sup>

Jenis-jenis asuransi menurut Hendi Suhendi yaitu:

- a. Asuransi Timbal Balik.

Asuransi Timbal Balik ialah beberapa orang yang memberikan iuran yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang saat mendapatkan kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dikumpulkan lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya demikian seterusnya.

- b. Asuransi Dagang.

Asuransi Dagang ialah asuransi yang diperuntukan kepada beberapa individu yang senasib bermusyawarah atau bermufakat

---

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 85-86

<sup>16</sup> *Ibid.*,

dalam mengadakan pertanggung jawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas cara kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

c. Asuransi Pemerintahan.

Asuransi Pemerintahan merupakan asuransi yang menjamin pembayaran kerugian kepada siapa saja yang menderita diwaktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang di pungut sebagai iuran dan asuransi yang lebih kecil dari pada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d. Asuransi Jiwa.

Asuransi Jiwa merupakan asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungjawabkan atas jiwa orang lain, yang mana penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang



mempertanggungjawabkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.

e. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan.

Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan ialah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Biasanya asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi berbagai kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f. Asuransi terhadap Bahaya-Bahaya Pertanggungjawaban Sipil.

Asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang ditujukan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan mobil, pesawat, kapal laut, motor, dan lainnya.<sup>17</sup>

## 5. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial atau *social insurance* yang ada di Indonesia adalah beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagai sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut biasanya berupa jaminan kepada seseorang atau beberapa anggota masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam memperjuangkan kehidupannya.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 308

Pemerintah memberikan bantuan dengan cara meminta partisipasi anggota masyarakat. Pemberian partisipasi anggota masyarakat itu pelaksanaannya diatur dan dikelola sendiri oleh pemerintah.

Adapun ciri-ciri khas asuransi sosial adalah:

- a. Penyelenggaraan pertanggungan atau asuransi adalah pemerintah.
- b. Hubungan hukum pertanggungan yang sifatnya adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat misalnya, bagi para penumpang kendaraan, baik darat, laut, dan udara.
- c. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan yang dibuat khusus untuk itu.
- d. Bertujuan untuk memberikan suatu jamina sosial (*social security*), bukan hanya untuk mencari keuntungan.

Asuransi sosial merupakan jawaban atas tuntutan Undang-Undang Dasar 1945, Khususnya pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial.

Adapun jenin-jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu:

- a. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil, disingkat TASPEN.
- b. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat ASBRI.
- c. Asuransi Sosial Tenaga Kerja, disingkat ASTEK.
- d. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri, disingkat ASKES
- e. Pertanggungan Kecelakaan Penumpang
- f. Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 87

## B. Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk asuransi syariah, diantaranya *Islamic insurance* (dalam bahasa Inggris) dan dalam bahasa Arab digunakan istilah *takaful*, *at-tam'in*, *adh-dhaman* (*tadhamun*).<sup>19</sup>

Ketiga kata yang disebutkan diatas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong. Ketiga padanan kata tersebut, lebih jelas adalah sebagai berikut.

#### a. Takaful

Menurut bahasa, *takaful* berasal dari kata *kafala* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang katanya berasal dari *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful*, yang berarti saling menanggung, atau menanggung bersama.<sup>20</sup>

*Takaful* dalam pengertian fiqh muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi tanggungan penanggung risiko yang lainnya.<sup>21</sup>

#### b. At-Ta'min

Menurut bahasa, *At-Ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seseorang yang men-*ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu

<sup>19</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 91

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 4

membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, penanggung atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati atau orang itu mendapat ganti rugi hartanya yang hilang. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta'min* dimaksud untuk menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang sewaktu-waktu dapat menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan tersebut, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.<sup>22</sup>

c. At-Thadhamun

Menurut bahasa, *At-Thadhamun* berasal dari kata *dhamun* yang berarti saling menanggung. Hal ini bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu kelompok masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah.<sup>23</sup>

Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, asuransi atau *at-ta'min* adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; yang mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 6

sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>24</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min*/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.<sup>25</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah, asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>26</sup>

Menurut Muhaimin Iqbal, Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta (nasabah) dan operator

---

<sup>24</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 92

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 193

<sup>26</sup> *Ibid.*,



(perusahaan asuransi). Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Quran dan as-Sunnah.<sup>27</sup>

Definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko di kemudian hari.<sup>28</sup> Asuransi banyak manfaatnya untuk perseorangan maupun bagi perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya asuransi masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman. Seorang pengusaha akan merasakan ketenangan manakala usahanya ditanggung oleh asuransi;
- b. Dengan asuransi perusahaan merasa lebih efisiensi karena risiko dapat ditanggulangi;
- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecendrungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin;
- d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit;
- e. Asuransi merupakan alat penabung; dan
- f. Asuransi sebagai sumber pendapatan.<sup>29</sup>

## 2. Sejarah Asuransi Syariah

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur *fiqih klasik*. Tercatat dalam

---

<sup>27</sup> Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 2

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112

literatur sederatan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Najetullah al-Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah, yang merupakan sederatan nama ulama ternama yang hidup di era modern. Jadi, asuransi Islam atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.<sup>30</sup>

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar*. Asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional.<sup>31</sup>

Muhammad Ma'shum Billah memberikan sebuah konsep yang konsep tersebut diberi nama dengan *takaful*. Yaitu sebuah konsep asuransi syariah yang didalamnya dilakukan kerjasama dengan para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-Mudharabah*. Perusahaan syariah bertindak sebagai *al-Mudharib* yang menerima uang pembayaran untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta *takaful* bertindak sebagai *shahib al-*

---

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 248

<sup>31</sup> *Ibid.*,

mal yang akan mendapatkan manfaat perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah.<sup>32</sup>

Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan munculnya perusahaan asuransi syariah diberbagai belahan dunia, antara lain Sundanese Islamic Insurance (1979), Islamic Arab Insurance Co. (1970) 48, Dar al-Maal al-Islami, Geneva (1981), Islamic Takaful Company (I.T.C), S.A, Luxembourg (1983), Islamic Takaful and Re-Takaful Company, Bahamas (1983), Syarikat al-Takafol al-Ismaiyah, Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985).<sup>33</sup> Kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan prinsip syariah diawali dengan beroperasinya bank-bank syariah. Hal itu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memperkrasai pendirian usaha Asuransi Takaful , dengan menyusun Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>34</sup> PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT

---

<sup>32</sup> Muhammad Ma'sum Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Kuala Lumpur-Malaysia, IIUM 2001), h. 17

<sup>33</sup> Andri Soemitra. *Op. Cit.*, h. 249

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2004), h. 140

Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful Kerugian) merupakan Perusahaan asuransi yang di realisasikan oleh TEPATI.<sup>35</sup>

Pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia memberikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak dibidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak dibidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian di resmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Adapun Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan mulai dioperasikan pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.<sup>36</sup>

### 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah yang dipakai asuransi Islam terdiri dari landasan asuransi Islam dan landasan yuridis (hukum),<sup>37</sup>

#### a. Al-Qur'an

##### 1.) Firman Allah tentang mempersiapkan hari depan

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), h. 101

<sup>36</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 105

<sup>37</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit.*, h. 158

*Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Hasyr [59]: 18).<sup>38</sup>*

- 2.) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang positif

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

*Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

*(Q.S. al-Maaidah [5]: 2).<sup>39</sup>*

- 3.) Perintah Allah untuk Melindungi dalam Keadaan Susah.

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ ۝

*Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. al-Quraisy [106]: 4).<sup>40</sup>*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: spesial for woman*, (Jakarta: Syaamil, 2007), h. 548

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 106

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 602



4.) Perintah Allah untuk senantiasa Bertawakal dan Optimis Berusaha.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah SWT; dan BarangSiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. at-Tagabun [64:11]).<sup>41</sup>*

b. As-Sunnah

1.) Hadits tentang Aqilah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَض] قَالَ: اقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَمُتَّتْنَاهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَيَّ النَّبِيِّ [ص] فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. [رواه البخارى].<sup>42</sup>

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, memutuskan ganti*

<sup>41</sup> Ibid., h. 557

<sup>42</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 366-

*rugi kematian wanita tersebut dengan uang dara (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)".* (HR. Bukhari).<sup>43</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya inilah yang dianggap merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.<sup>44</sup>

## 2.) Hadits anjuran untuk menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه مسلم] ٤٥

*"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda: "siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya padahari kiamat, siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannyabaik di dunia maupun di akhirat"* (HR. Muslim).

<sup>43</sup> Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, CV. Asy-Syifa', Juz 9, (Semarang: 1993), h. 45

<sup>44</sup> A.M. Hasan Ali, *Op. Cit.*, h.115

<sup>45</sup> Al-Iman Abi Zakariya Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhamasqi, *Syarah Shahih Muslim: di Tahqi'* oleh Ngimad Zakiy Al-Barudiy, Juz 17 (Mesir: Al- Makhtabah Al-Thaufiqiya, 2008), h. 17

Hadits di atas bermakna adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia salah satunya dengan cara menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawi nya niscaya Allah SWT., akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhirat nya.

c. Piagam Madinah

Rasulullah SAW. meng-undangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup tawanan yang tinggal di negara tersebut. Seorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *aqilah* dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan menjadi pertimbangan sebagai bentuk lain dari pertanggungan sosial (*social insurance*).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاً هَذَا مَعَهُمْ. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَا قُلُوبُنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَقْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW., di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka,

*menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum mubajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.”*

Suku Bani Auf, Bani Harit, dan suku yang lainnya yang hidup di Madinah pada saat itu, diwajibkan membayar hutang darah dalam komunitas bersama berlandaskan pada doktrin *aqilah* sebagai peraturan dalam konstitusi.<sup>46</sup>

d. *Ijtihad.*

- 1.) Fatwa *Sahabat*, Praktik yang dilakukan pada masa sahabat yang berkenaan dengan pembayaran hukum (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut maka berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka, Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. Praktik inilah yang dianggap mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 121

2.) *Ijma*, Kesepakatan-kesepakatan para sahabat dalam melakukan *Ittifaq*, dalam hal *aqilah* yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menentang *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain yang secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayaran, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar r.a., bisa disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini. Persoalan *ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW. saat itu dianggap sama hal nya dengan praktek asuransi.

3.) *Qiyas*, adapun yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyama hukum yang tidak terdapat ketentuan nya di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan hukum yang disebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau asalnya), Sistem *aqilah* pada zaman pra-Islam di-*qiyas* – kan dengan sistem *aqilah* yang diterima pada zaman Rasulullah SAW. dan tercatat pula ada beberapa ulama yang menekuni kajian asuransi

untuk menemukan hukum asuransi, diantaranya adalah Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Najetullah al-Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah.

4.) *Istihsan*, adapun yang dimaksud istihsan adalah penetapan hukum yang beralih berdasarkan adat kebiasaan. Adapun mekanisme istihsan berlaku dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno/pra-Islam. Letak dari fenomena sebenarnya dari sistem ini adalah dapat mengubah dan meminimalisasi aksi balas dendam yang berkelanjutan di masa yang akan datang menjadi saling tolong menolong.<sup>47</sup>

5.) *Maslahah Mursalah*, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang kemaslahatan tersebut.<sup>48</sup> Dalam asuransi sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada hukum *syara'* atau dalil yang jelas menerangkan bahwa asuransi itu halal dan begitupun sebaliknya, tidak ada hukum *syara'* atau dalil yang jelas menerangkan bahwa asuransi haram, tetapi melihat dari segi *Maslahah Mursalah* asuransi tentu ada kemaslahatannya seperti: tolong menolong, dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi dan lain sebagainya.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 169

<sup>48</sup> Hasan Baharudin dan Syafiqiyah Adhimiy, *Litimasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Prespektif Mashlahah Mursalah*, dalam jurnal *Al- 'Adalah* Vol. 15, Nomor 1, 2018, h.158. Online tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> (04 Maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



e. Landasan Yuridis

Peraturan tentang asuransi syariah masih bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pereasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Pereasuransian.<sup>49</sup>

Peraturan tersebut adalah landasan oprasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tentang asuransi syariah.<sup>50</sup>

A.M. Hasan Ali mengemukakan secara struktural, landasan operasional asuransi syariah masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha pereasuransian secara umum.<sup>51</sup>

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Walaupun kita tahu dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan

<sup>49</sup> A.M. Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 171

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> A.M. Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 154

pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah. Maka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah.<sup>52</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika di bangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, asuransi harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:

##### a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah prinsip dasar atau pondasi utama dari setiap bentuk bangunan yang terdapat dalam syariat Islam. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Perlu diperhatikan dalam berasuransi yaitu bagaimana cara menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan, setidaknya setiap melakukan aktivitas berasuransi ada keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak-gerik langkah kita dan tak luput berada bersama kita.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit*, h.172

<sup>53</sup> A.M. Hasan Ali, *Op. Cit*, h.125

b. Tolong Menolong (*ta'awun*)

Prinsip asuransi syariah yang berikutnya tolong menolong karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*, yaitu akad kebaikan.<sup>54</sup> Perintah saling tolong menolong terdapat dalam surah al-Maaidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maaidah [5]: 2).*<sup>55</sup>

c. Kerja Sama (*coorperation*)

Adapun kerja sama yang diterapkan di dalam asuransi syariah yaitu dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun akad *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h.99

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*,.

<sup>56</sup> Mardani, *Loc. Cit.*,.

d. Kerelaan (*al-Ridha*)

Prinsip asuransi berikutnya adalah prinsip kerelaan (*al-Ridha*), kerelaan (*al-Ridha*) bisa dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi, agar mempunyai motivasi sejak awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan agar tujuan utama membantu anggota asuransi yang lain dapat terwujud.<sup>57</sup>

e. Amanah (*al-Amanah*)

Prinsip yang seharusnya diterapkan dalam semua asuransi syariah adalah prinsip amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Prinsip amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.<sup>58</sup>

f. Keadilan (*justice*)

Prinsip selanjutnya yang harus diterapkan didalam asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan yang di maksud

<sup>57</sup> A.M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, h. 131

<sup>58</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 100

dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.<sup>59</sup>

g. Bebas Riba

Prinsip asuransi syariah selanjutnya adalah bebas riba. Tentu kita tahu setiap transaksi seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan seperti riba.<sup>60</sup> sesuai dengan firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (muamalah) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Q.S. an-Nisa' [4]: 29).*<sup>61</sup>

h. Bebas Gharar (Ketidakpastian)

Prinsip selanjutnya adalah Bebas Gharar, *Gharar* secara bahasa berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasan. Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> A.M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, h.126

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.83

<sup>62</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.101

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- 1.) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis;
- 2.) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri.<sup>63</sup>

i. Bebas Maisir (Judi)

Allah SWT. telah menegaskan terhadap keharaman melakukan aktivitas berekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi), sesuai dengan firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maaidah [5]:90).<sup>64</sup>

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> A.M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, h.135

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.123

<sup>65</sup> A.M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, h. 134



## 5. Akad dan Produk Asuransi Syariah

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dipakai dalam asuransi syariah adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan adalah hibah. Akad *tijarah* dalam perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. implementasi konsep *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah diantaranya adalah:

- a. Adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan Islam.
- b. Adanya bagi hasil dalam *direct investment* (yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Islam)
- c. Adanya bagi hasil antara peserta/tertanggung dengan perusahaan asuransi Islam/penanggung atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan atau akad diawal.
- d. Bagi hasil dalam penentuan *rate* premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan.

Sementara dalam pelaksanaan konsep *mudharabah* asuransi umum diantaranya adalah penggunaan akad *mudharabah* dalam melakukan perhitungan “*surplus underwating*”, dalam persyaratan pembayaran

*mudharabah*, formula perhitungan *mudharabah*, dan juga dalam tata cara pembayaran asuransi umum syariah dengan akad *mudharabah*.

Adapun beberapa produk asuransi syariah yang sudah ada di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Produk tabungan, Produk tabungan biasanya digunakan sebagai rana investasi, juga biasanya digunakan sebagai tabungan untuk keperluan naik haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan. Khusus untuk asuransi syariah adalah tabungan untuk pendidikan anak, sebagai penerima hibah dana asuransi tersebut akan menerima dana hingga pendidikannya diperguruan tinggi sesuai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Bila anak selaku penerima hibah dana asuransi syariah meninggal sebelum sempat menikmati tabungan asuransi pendidikan syariah yang telah dirintis oleh orang taunya, maka dana tersebut akan dibayarkan kepada para ahli warisnya.
- b. Produk asuransi syariah bukan tabungan, Progam ini dapat dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi syariah yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi, atau biasa disebut *al-khairat*, santunan bagi ahli waris bila nasabah wafat karena kecelakaan dalam masa perjanjian, dan juga dana asuransi syariah untuk kepentingan kesehatan.

- c. Prosuk asuransi syariah bukan tabungan untuk kepentingan umum (*general Islamic insurance*).

Selain dengan menggunakan akad *mudharabah*, konsep pada produk asuransi syariah juga dapat menggunakan akad *wadiah*, *wakalah*, dan *musyarakah*.<sup>66</sup>

*Akad wadiah*. *Wadiah*, berarti meninggalkan atau menjaga. *Akad Wadiah* memiliki beberapa landasan hukum Islam, di antaranya adalah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya . . .*(Q.S. an-Nisaa' [4]: 58).<sup>67</sup> Berdasarkan landasan ayat Al-Quran di atas, ulama sepakat bahwa akad *wadiah* boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat tolong menolong dalam dunia asuransi syariah. Akad *wadiah* yang digunakan dalam asuransi Islam ini adalah *wadiah yad dhamanah*, di mana pihak yang dititipkan dana, dalam hal ini perusahaan asuransi syariah berhak untuk memanfaatkan dana tersebut. Penitipin dilakukan dalam rekening giro.

*Wakalah*, berarti penyerahan, atau pendelegasian. Dengan begitu secara ringkas dapat dikatakan bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari satu pihak untuk

<sup>66</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit*, h.182

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.87

dilaksanakan oleh pihak lainnya.<sup>68</sup> Adapun landasan syariah dari akad *wakalah* dalam bermuamalah adalah Q.S. al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ  
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا  
أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).<sup>69</sup>

Melihat landasan di atas para ulama fikih bersepakat (*ijma*)

bahwa akad *wakalah* diizinkan dalam muamalah. Termasuk hal ini adalah asuransi syariah, konsep akad *wakalah* banyak dipakai dengan adanya konsep pemasaran, di mana dalam asuransi syariah mendelegasikan berbagai macam informasi dan manfaat menggunakan asuransi syariah melalui tenaga-tenaga pemasaran mereka.

*Musyarakah*, adalah perjanjian antara dua pihak ataupun lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu. Konsep asuransi syariah pada konsep *musyarakah* di mana terdapat perusahaan asuransi yang

<sup>68</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit.*, h.183

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.295

memiliki tenaga juga keahlian, serta peserta asuransi syariah yang memiliki dana dan juga modal.<sup>70</sup>

## 6. Sistem Klaim Asuransi Syariah

Klaim (*Claims*) adalah proses di mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.<sup>71</sup>

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang merupakan hak peserta asuransi yang sebaiknya dapat diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan<sup>72</sup>. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-*

<sup>70</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Op. Cit*, h.184

<sup>71</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep and General): Konsep dan Sistem Operasional*, ( Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 259

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 260

*amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.* (Q.S. al-Anfaal [8]: 27).<sup>73</sup>

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim, kita harus melihat beberapa hal berikut.<sup>74</sup>

#### a. Jenis Kerugian

Sebelum mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah, tentu peserta asuransi harus paham dahulu jenis-jenis kerugian. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga.

##### 1.) Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Kerugian seluruhnya (*total loss*), objek atau benda yang dipertanggungkan secara teknis mengalami kerusakan seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut.

##### 2.) Kerugian sebagian (*partial loss*)

Kerugian sebagian (*partial loss*), merupakan semua kerusakan dari objek atau benda yang dipertanggungkan hanya sebagian. Secara teknis biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki objek tersebut tidak lebih dari 50% harga objek tersebut.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.153

<sup>74</sup> Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit.*



### 3.) Kerugian pihak ketiga

Kerugian pihak ketiga maksudnya ialah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya, kendaraan tertanggung menabrak diri atau harta benda pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan luka badan atau kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.<sup>75</sup>

#### b. Penggantian kerugian

Proses penggantian kerugian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yaitu, pemilihan cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan uang tunai, memperbaiki, atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan.<sup>76</sup>

#### c. Prosedur Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Adapun prosedur klaim nya adalah sebagai berikut:

##### 1.) Pemberitahuan Klaim

Peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 261

<sup>76</sup> *Ibid.*,

sebaiknya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

## 2.) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat kerugian diminta menyediakan fakta-fakta atau bukti-bukti kerugian. Yang bertujuan penting bagi peserta yang mendapat kerugian untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” yang disediakan perusahaan asuransi atau penanggung.

## 3.) Penyelidikan

Setelah laporan yang dibuat dan dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Misalnya, apakah premi sudah dibayar atau belum. Setelah tahap ini selesai penanggung akan segera melakukan survei kelapangan atau menunjuk *independent adjuster*, laporan survei tersebut akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera memberikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim diterima secara teknis dijamin polis maka penanggung atau perusahaan asuransi akan segera menghubungi tertanggung

mengenai kesepakatan berupa nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

#### 4.) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.<sup>77</sup>

Proses Klaim sangat penting adanya peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Claim Settlement,<sup>78</sup> Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tugas dan fungsi Dewan Syariah adalah: (1) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. (2) Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>79</sup> Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa dalam operasional dan strategi suatu perusahaan

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 262

<sup>78</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.87

<sup>79</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah.

sangat memerlukan suatu pengawasan. Mengawasi berarti memantau dan mengamati dengan berbagai cara yang diperlukan, seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan yang sedang berjalan, membaca laporan, dan lain sebagainya. Tujuan nya adalah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak sengaja dari semua rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>80</sup>

## 7. Pandangan Ulama tentang Asuransi Syariah

Asuransi merupakan persoalan baru dalam perkembangan Fiqih Kontemporer. Persoalan ini tidak terjadi pada perkembangan Fiqih Islam pada Zaman Imam Mazhab. Oleh karena itu, timbul perbedaan pendapat dalam kalangan ulama kontemporer dalam menentukan hukum asuransi.

Cendekiawan-cendekiawan muslim menyatakan ada empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqih al-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Mut'i, alasannya antara lain:
  - 1) Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
  - 2) Ada unsur tidak jelas (*Gharar*) dan tidak pasti;

---

<sup>80</sup> Desmadi Saharuddin, *Loc. Cit.*,

- 3) Terdapat unsur riba/rente;
- 4) Terdapat unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran premi yang telah dibayarkan;
- 5) Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan);
- 6) Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai;
- 7) Hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.<sup>81</sup>

Pengharaman asuransi menurut Mahdi Hasan melarang praktik asuransi dengan mengemukakan alasan berikut;

- 1) Asuransi tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan wajib adanya;
- 2) Asuransi adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada`munculnya`risiko;
- 3) Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, institusi yang mengadakan transaksi atau asuransi adalah dengan transaksi riba meskipun milik negara.
- 4) Dalam asuransi ada unsur penyuapan (*Risywah*), karena kompensasi didalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 310

- b. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini.

Pendapat dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhamamad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- 1) Hukum asuransi tidak terdapat dalam nash Alqur'an maupun nash al-Hadis yang melarang asuransi tersebut;
- 2) Pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;
- 3) Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- 4) Asuransi mengandung prinsip kepentingan umum, karena premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah*, maksudnya adalah asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mana perusahaan asuransi tersebut yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit dan loss sharing*);
- 6) Asuransi termasuk *syirkah ta'awuniyah*;

---

<sup>82</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h.80



- 7) Dianalogikan atau diqiaskan seperti sistem pensiun, contohnya taspen;<sup>83</sup>
- 8) Operasional asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama; dan
- 9) Asuransi dapat menanggulangi risiko manusia dari kecelakaan, kerugian harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya.

Alasan-alasan di atas asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendapatkan kemaslahatan orang banyak yang dibenarkan oleh agama.<sup>84</sup>

Fuad Mohammad Fachruddin menjelaskan asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, diakibatkan oleh pekerjaan. Negara memberikan asuransi kepada setiap orang yang membayar iuran premi yang telah ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju kearah kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu, asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.<sup>85</sup>

Asuransi kecelakaan, yaitu asuransi nya tergolong kepada asuransi campur atau asuransi yang didalamnya termasuk penabungan.

Asuransi campur mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya

---

<sup>83</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 83-84

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.311

<sup>85</sup> Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), h. 211

kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayarkan apabila, jika tertanggung belum meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam karena asuransi campur didalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan dikemudian hari. Syaratnya, perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan dengan asuransi biasa menurut Fuad Mohammad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju kearah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.<sup>86</sup>

Kelompok ulama yang membolehkan asuransi mengemukakan argumentasinya secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Asuransi bukan termasuk perjudian dan bukan pertaruhan, karena berdasarkan pada prinsip mutualisme (saling menguntungkan) dan kerja sama yang melindungi dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta serta memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri. Sedangkan perjudian adalah suatu permainan keberuntungan;
- 2) Ketidakpastian (*gharar*) di dalam bermuamalah sangat dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan, sedangkan asuransi jauh dari ketidakpastian, khususnya ketika disertai dengan satu

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 212

ganti rugi yang pasti, yaitu berupa keamanan yang dirasakan oleh peserta asuransi sebagai pengganti untuk setiap cicilan;

- 3) Asuransi bukan cara untuk menolak kekuasaan Allah atau menggantikan takdir Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi, tetapi mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau risiko yang sudah dipastikan terjadi. Kematian hal yang sudah pasti datangnya, oleh karena itu dengan adanya asuransi bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil akibatnya dengan cara saling menolong dan membantu;
- 4) Keberatan mengenai tidak tentu nya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. Cicilan yang tidak tentu dalam asuransi jiwa tidaklah mempengaruhi keabsahan kontrak, juga tidak merugikan pihak manapun, karena jumlah dari tiap cicilan menjadi diketahui ketika dibayar dan begitu pula jumlah total dari semua cicilan pada saat semuanya sudah dibayar;
- 5) Keberatan mengenai riba, dalam asuransi jiwa tidak dapat dijadikan alasan. Karena pada asuransi jiwa membolehkan peserta asuransi atau tertanggung untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 82

Melihat begitu gencarnya para ulama beradu argumentasi antara membolehkan dan mengharamkan asuransi, AM. Hasan Ali, memberikan solusi dalam pemikiran yang mengacu pada (*hujjah*) pemikiran dari kedua belah pihak, yakni sebagai berikut:

- 1) Asuransi dengan segala bentuknya adalah boleh (seperti pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa), apabila terbebas dari unsur riba, *maisir* dan *gharar* (ketidak pastian), seperti yang menjadi dasar pemikiran kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada unsur riba;
- 2) Jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi diinvestasikan, berdasarkan prinsip akad *mudharabah* (di mana pemberi pinjaman ikut menanggung keuntungan maupun kerugian), untuk usaha-usaha komersial. Sebagai pengganti bunga yang ditentukan sebelumnya, keuntungan dibagikan sebagaimana umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial;
- 3) Menjalankan bisnis asuransi dalam bentuk koperasi, para pemegang polis terikat berdasarkan dengan persetujuan yang telah mereka buat, untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka-sepertiga atau seperempat- untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf, yang akan digunakan, dibawah peraturan-peraturan khusus, untuk membantu orang-orang yang menjadi korban kecelakaan.

- 4) Apabila terjadi kecelakaan, bantuan diberikan hanya kepada mereka yang terikat oleh kontrak dan para pemegang saham perusahaan.
  - 5) Jumlah asli ditambah keuntungan diberikan kepada setiap pemegang saham yang dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai dana wakaf (*tabarru'*).
  - 6) Perlu adanya Dewan Syariah Independen yang fungsinya betul-betul mengontrol operasional sebuah perusahaan asuransi, apakah akad dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>88</sup>
- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.
- Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.<sup>89</sup>
- d. Menganggap asuransi adalah syubhat karena tidak ada dalil-dalil syara yang secara rinci menjelaskan haram ataupun halalnya. Hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi.

---

<sup>88</sup> A.M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, h. 149-150

<sup>89</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*,

Umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.<sup>90</sup>

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut:

- 1) Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari kerugian yang mungkin timbul;
- 2) Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effsiency*);
- 3) Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi;
- 4) Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussiness*.<sup>91</sup>

Sedangkan keraguan umat Islam terhadap kedudukan hukum asuransi karena asuransi dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), gambling (*maisir*), riba dan komersial. Agar dapat melibatkan umat Islam secara optimal terhadap usaha asuransi, maka pada tanggal 25 Agustus 1994 dibentuklah Asuransi Takaful Keluarga, yang beroperasi dibawah perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia.<sup>92</sup>

## 8. Pertanggungjawaban Asuransi Syariah

Bisnis Asuransi pada dasarnya harus dilakukan dengan sikap saling percaya, namun pada kenyataannya juga banyak terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Pada asuransi umum syariah

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004), h. 188

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 189



hampir sembilan puluh persen (90%) dari tuntutan klaim yang diajukan nasabah menimbulkan sengketa, yang disebabkan karena klaim yang mereka ajukan mendapat penolakan dari pihak asuransi. Penyebab sengketa tersebut bermacam-macam, misalnya karena kesalahan nasabah dalam menafsirkan polis atau pengingkaran terhadap pelaksanaan kontrak perjanjian oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebelum dibentuknya BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia), nasabah hanya bisa mengelus dada pada saat tuntutan klaim ganti rugi yang mereka ajukan ditolak oleh pihak asuransi. BMAI merupakan salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS) dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalamnya, tergabung tiga perhimpunan asuransi, yaitu: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI).<sup>93</sup>

### C. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

M. Sholahuddin mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Menurutnya, asuransi konvensional memakai dasar ikatan pertukaran, pertukaran yang dimaksud ialah pertukaran antara pembayar premi asuransi dengan uang pertanggungjawaban. Sedangkan beliau menjelaskan dalam syariat Islam, pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga tidak mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan

---

<sup>93</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 101

lainnya apabila putus ditengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa haknya yang akan di peroleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim dan ketidakterbukaan. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi pelaksana kemudian di investasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Hal ini dapat diketahui bahwa praktek asuransi menurut syariat Islam hukumnya adalah haram. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga keberatan dalam praktik asuransi konvensional yakni: pertama, *Maysir* atau untung-untungan, kedua, *Gharar* atau ketidakpastian, ketiga, ada unsur riba.

94

Muhamad Firdaus, menjelaskan bahwa dalam asuransi konvensional, *maysir* dapat timbul karena dua hal yakni: pertama, sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada kemungkinan dia berhenti karean alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebesar 20% dan selebihnya hangus; kedua, apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung, tetapi jika salah dalam perhitungan maka akan rugi.<sup>95</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Untuk

---

<sup>94</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, ( UMS Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 133

<sup>95</sup> Muhammad Firdaus dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 25

lebih rinci berikut tabel perbandingan asuransi konvensional dengan asuransi syariah:

**Tabel. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2	Asal usul	Berawal dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang pada saat itu dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Berasal dari <i>Al-Aqilah</i> , Kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, dan bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madina) yang dimuat langsung Rasulullah.
3	Sumber Hukum	Sumber hukum asuransi konvensional sumbernya adalah dari pikiran manusia dan budaya/kebudayaan. Seperti hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Sumber hukumnya bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, atau kebiasaan Rasul, Fatwa Sahabat, <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , 'Urf 'tradisi/adat', dan <i>Al-Mashalah Al-Mursalah</i> .
4	"Maghrib" ( <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba)	Tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu bersih dari adanya praktik <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Dalam asuransi konvensional tidak ada dewan pengawas syariah sehingga dalam praktiknya banyak hal-hal	Pada asuransi syariah ada dewan pengawas syariah, yaitu organisasi yang berfungsi dan bertugas

		bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.	untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang tidak berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Pada asuransi konvensional menggunakan akad jual beli seperti; akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i> .	Pada asuransi syariah menggunakan akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> ( <i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan lain lain).
7	Jaminan/risk (risiko)	<i>Transfer of risk</i> , terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya ( <i>ta'awun</i> ).
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i> ).	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>tern (insurance life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana <i>insurance</i> .	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta ( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudharib</i> ) dalam

			mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi asuransi konvensional terdiri dari <i>mortalitas</i> ( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> ).	Unsur premi pada asuransi syariah adalah dari iuran atau kontribusi dari unsur <i>tabarru'</i> dan dari tabungan (yang tak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga <sup>96</sup>
12	<i>Loading</i>	Pada asuransi konvensional, <i>Loading</i> cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih <i>hangus</i> ).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahunan pertama sudah terbentuk.
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah melalui rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tetanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim asuransi syariah diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> yaitu peserta yang saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14	Sistem akuntansi	Sistem akuntansi asuransi konvensional adalah akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Pada asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi <i>cash basis</i> , yaitu mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan asuransi syariah menganggap <i>accrual basis</i> bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadinya di masa

<sup>96</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2012), h.260-261

			yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh asuransi konvensional adalah dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit atau keuntungan yang diperoleh asuransi syariah diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, yang keseluruhannya bukan menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta.
16	Misi dan visi	Misi besar utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah ( <i>ta'awun</i> ), dan misi pemberdayaan umat (sosial). <sup>97</sup>

Sumber: Abdul Manan dan Wirdiyaningsih.

Uraian tabel di atas sudah sangat jelas bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu terletak pada prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Sedangkan dalam asuransi konvensional adalah pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dilihat dari visi dan misi nya pun asuransi syariah lebih mengedepankan misi akidah, ibadah dan pemberdayaan umat bukan hanya sebatas tujuan sosial dan ekonomi saja. Sumber pembayaran klaim pun pada asuransi konvensional adalah dari rekening perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Seperti penjelasan tabel di atas banyak sekali perbedaan nya,

<sup>97</sup> Wirdiyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005), h. 186-187



namun 3 pokok perbedaan di atas yang menjadi titik tolak perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.



### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1. Sejarah Asuransi Jasindo**

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) pemebentukannya adalah bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas *NV Assurantie Maatschappij de* nasionalisasi atas *NV Assurantie Maatschappij de Nederlander*, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, sekaligus meng-amanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk, melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama ke-duanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkuat keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum

Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan bersejarah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), melalui Keputusan Menteri Keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.

Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan Asuransi Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga dapat berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka kemudian muncul sebuah inisiatif untuk

mengoptimalkan fungsi dan peran dari kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan sekaligus mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang teguh akan nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan yaitu Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi memenuhi kepuasan nasabah. Asuransi Jasindo juga banyak mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka dari seluruh belahan dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, dalam memberikan back-up reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat mega-risk.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, yaitu; komitmen atas ketepatan dan kecepatan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan rupiah. Misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US\$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US\$ 31,2 juta, Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US\$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US\$ 101,5 juta.

Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang decak kagum ini, telah diakui oleh badan pemeringkat internasional yaitu Standard and Poor's untuk kategori "*Claim Paying Ability* " pada tahun 1997 dengan peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi Jasindo

kembali mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Asuransi Umum nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat internasional AM Best yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, untuk kategori “ Financial Strength Ability” (Stable Outlook ) dengan peringkat B++ dan Issuer Credit Ability (Stable Outlook) dengan peringkat BBB.<sup>1</sup>

## 2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

### a. Visi

“Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik”.

(Participate in the market as market leader. Generate sustainable profitability above top competitors. Provide service excellence to customers).

### b. Misi

“Menyediakan jasa asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa”.

### c. Budaya Perusahaan

Nilai-nilai budaya perusahaan RAISE dilahirkan dengan melihat berbagai aspek seperti visi dan misi perusahaan , budaya yang telah ada, budaya yang ingin dibentuk, aspirasi karyawan, aspirasi

---

<sup>1</sup> <https://www.jasindo.co.id/tentang-kami/riwayat> (diunduh pada tanggal 22 Maret 2019, pukul 23:18 WIB) yang merupakan rekomendasi untuk penulisan oleh bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAIK selaku kepala unit teknik PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, yang penulis berkesempatan wawancara kepada beliau, pada tanggal 22 Maret 2019.

management, aspirasi customer dan aspirasi pemangku kepentingan lainnya.

RAISE kemudian lahir dengan lima nilai budaya dengan masing-masing memiliki penjabaran dan perilaku kunci (*Key Behaviours*). Berikut ini adalah penjabaran dari RAISE:

### **Resourceful**

Setiap karyawan jasindo tidak berhenti mengasah diri untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh pelanggan, rekan kerja, dan perusahaan. Jasindo memberikan produk, proses dan layanan yang kreatif dan inovatif sebagai keunggulan untuk memenangkan persaingan bisnis.

### **Agility**

Setiap karyawan jasindo adalah pribadi yang antusias dan tangkas dalam menyongsong setiap kesempatan, situasi dan perubahan.

### **Integrity**

Setiap karyawan jasindo menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, serta menjaga kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan perusahaan dengan segenap hati dalam menyuguhkan kinerja dan layanan yang berkualitas.

### **Synergy**

Setiap karyawan jasindo adalah anggota keluarga besar jasindo yang bertumbuh dengan baik karena adanya kerja sama yang erat, sinergi yang kuat, dan rasa kebersamaan yang terjaga.



### Excellent Service

Setiap karyawan jasindo berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah dan memberikan layanan prima bagi pelanggan internal dan eksternalnya.<sup>2</sup>

### 3. Produk Asuransi Jasindo

#### a. Jasindo Agri

Jasindo Agri merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada para petani, peternak dan nelayan agar mendapatkan **kenyamanan** dan **keamanan** dalam menjalankan kegiatan mereka seperti pengelolaan usahatani, peternakan dan usaha penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan.

#### b. Jasindo Travel Insurance

Jasindo Travel Insurance adalah produk asuransi jasindo untuk perjalanan yang **komprehensif**, yang memberikan jaminan manfaat perlindungan medis (*reimbursement*), bantuan darurat (evakuasi dan repatriasi), kecelakaan diri dan meninggal dunia akibat kecelakaan, ketidaknyamanan perjalanan, dan manfaat lainnya; untuk tertanggung yang melakukan perjalanan lintas negeri maupun lintas negara.

#### c. Jasindo Kebakaran

Asuransi Kebakaran merupakan produk asuransi Jasindo yang memberikan Jaminan atas kerugian/kerusakan harta benda, atau

---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAAIK selaku Kepala Unit Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, pada tanggal 22 Maret 2019.

kepentingan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

d. Jasindo Rekayasa (*Engineering*)

Setiap perencanaan, pelaksanaan hingga operasional sebuah proyek di bidang teknik tentu memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha.

Jasindo Rekayasa (*Engineering*) adalah produk asuransi yang memberikan jaminan risiko yang memberikan perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (*third party*).

e. Jasindo Aviation dan Satelit

Jasindo Aviation dan Satelit adalah produk asuransi jasindo yang menawarkan produk-produk asuransi pesawat untuk memberikan jaminan perlindungan atas segala aktifitas penerbangan udara untuk risiko-risiko yang dijamin didalam kondisi polis. Seperti risiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, *personal accident*, *lost of licence*, serta *ground handling liability*. Selain produk-produk asuransi aviation, Asuransi Jasindo juga menawarkan produk jaminan asuransi terhadap risiko-risiko satelit pada saat *pre-launch*, *launch* dan ketika satelit in orbit.

f. Jasindo Keuangan

Produk asuranisi dalam suatu bentuk penjaminan yang diminta oleh pihak *Obligee* (pemilik proyek) kepada *principal* (pelaksana proyek) atau tertanggung dengan maksud untuk menyatakan

kemampuan principal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak / perjanjian. Jenis jaminannya antara lain: Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, *custom bond* dan kontrak garansi.

g. Jasindo bidang Kelautan (*Marine Insurance*)

Jasindo Kelautan adalah produk asuransi jasindo yang memberikan jaminan perlindungan kerugian atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan pendukungnya.

h. Jasindo Minyak dan Gas (*Gas and Oil Insurance*)

Jasindo Minyak dan Gas (*Gas and Oil Insurance*) adalah produk asuransi yang dikhususkan pada kegiatan industri minyak dan gas yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap kerusakan atau kerugian pada industri tersebut.

i. Jasindo *Health*

Jasindo *Health* merupakan produk asuransi kesehatan yang sangat komprehensif meliputi jaminan Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Gigi, Manfaat Melahirkan, Manfaat Kacamata, serta Manfaat Medical Check Up.

j. Jasindo Sekolah

Asuransi sekolah adalah produk asuransi yang memberikan jaminan asuransi untuk Siswa/Pelajar atau Mahasiswa dari kecelakaan, sehingga dengan adanya asuransi ini orang tua murid merasa aman dan

tentram dalam menghadapi biaya-biaya pengobatan/dokter apabila siswa/pelajar atau mahasiswa mengalami kecelakaan.

k. Jasindo Pengangkutan (*Cargo*)

Jasindo Pengangkutan (*Cargo*) adalah jaminan terhadap risiko-risiko yang mengancam barang anda yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara.

l. Jasindo Lintasan

Jasindo Lintasan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan proteksi dalam seluruh perjalanan baik melalui udara, laut maupun perjalanan darat selama masa pertanggungan sesuai tertera di dalam Kartu Peserta Lintasan Anda.

m. Jasindo OTO Plus

n. Jasindo OTO

o. Jasindo Mikro

p. Jasindo Pelangi

Jasindo Pelangi merupakan produk asuransi yang memberikan proteksi dalam penerbangan dan pelayaran.

q. Jasindo Mudik

Jasindo Mudik adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan asuransi perjalanan pada saat mudik hari Lebaran, Natal, dan Tahun Baru serta Hari Besar lainnya yang berlaku sejak H-10 hingga H+10.

4. Kepala Cabang yang Memimpin Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Bandar Lampung adalah Bapak **ir. Sugeng Prapto., M.M.**<sup>3</sup>

## **B. Gambaran Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)**

### **1. Latar Belakang Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)**

Usaha peternakan pasti memiliki berbagai risiko kematian yang diakibatkan karena kecelakaan, bencana alam termasuk pula wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Tahun 2018, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Prasarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau yang sedang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan.

Adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini, maka peternak yang mengalami kerugian usaha budi daya ternaknya, akan mendapat dana

---

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAAIK selaku Kepala Unit Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, pada tanggal 22 Maret 2019.

ganti rugi berupa asuransi usaha ternak sapi yang dapat digunakan sebagai modal untuk melanjutkan usahanya.

2. Tujuan, dan Sasaran.

- a. Tujuan dibentuknya AUTS adalah untuk mengalihkan atau meminimalisir risiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.
- b. Sasaran dibentuknya AUTS adalah dapat terlindunginya peternak sapi dan kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan agar peternak dapat melanjutkan usahanya.

3. Organisasi Pelaksanaan.

Penyelenggaraan AUTS, diperlukan pelaksana untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian pelaksana AUTS disusun sebagai berikut:

- a. Pelaksana AUTS Pusat: Direktorat Jenderal PSP, Ditjen PKH, Pokja Asuransi Pertanian dan eselon 1 terkait:
  - 1) Merumuskan dan menyusun program asuransi pertanian;
  - 2) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 3) Menerima usulan dan menetapkan peserta AUTS;
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;
  - 5) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS kepada Menteri Pertanian.



b. Pelaksanaan AUTS Provinsi: Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

- 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Menerima usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengusulkan penetapan peserta asuransi kepada Ditjen PKH secara periodik;
- 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;
- 5) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan AUTS kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c. Pelaksana AUTS Kabupaten Kota: Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

- 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Melakukan pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi;
- 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
- 4) Mengusulkan peserta AUTS sebagai Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;

- 6) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

#### 4. Pelaksanaan

##### a. Kriteria

- 1) Peternak sapi yang sedang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan;
- 2) Sapi betina dalam keadaan sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
- 3) Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Persyaratan

- 1) Sapi harus memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag*, *necktag*, *micro-chip* atau lainnya);
- 2) Peternak sapi harus bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari premi yang telah ditetapkan perundang-undangan; dan
- 3) Peternak sapi harus bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi yang diberikan oleh asuransi pelaksana.

##### c. Pertanggungan AUTS

- 1) Risiko yang dijamin
  - Risiko mati karena penyakit;
  - Risiko mati karena kecelakaan;
  - Risiko mati karena beranak; dan

- Sapi hilang karena kecurian.

## 2) Ganti rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terjadi kematian atas ternak sapi yang di asuransikan;
- Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

## 3) Harga Pertanggungan

Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungan seluruh sapi. Harga Pertanggungan tersebut menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

## 4) Premi Asuransi Ternak Sapi

Premi asuransi untuk asuransi ternak sapi untuk para peternak adalah sebesar Rp. 40.000,-/tahun/ekor. Premi asuransi tersebut berasal dari 2% dari harga pertanggungan yang sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per ekor per tahun. Peternak mendapatkan besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,-/ekor/tahun. Besaran premi itulah yang harus dibayarkan peternak untuk tiap tahun dan tiap satu ekor sapi yang mereka asuransikan

### 5) Jangka waktu pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak sapi.

### 5. Mekanisme Pelaksanaan.

Adapun mekanisme pelaksanaa Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dinas Kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pendataan dan pendampingan calon peserta AUTS yang melakukan usaha pembiakan diwilayah binaannya.
- b. Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pendataan calon peserta asuransi usaha ternak sapi, (yang data tersebut disebut Daftar Peserta Sementara/ DPS) yang kemudian selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)).
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)) bersama dengan Dinas yang melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta AUTS untuk selanjutnya melanjutkan pendaftaran yang ditindak lanjuti dengan asesmen.
- d. Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana dalam hal ini yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) menyetujui calon peserta AUTS

sebagai peserta AUTS wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi Rp. 200.000,- yaitu menjadi Rp. 40.000,-/ekor/tahun. Asuransi Pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUTS memberikan: a) Bukti asli pembayaran premi swadaya: b) polis/sertifikat asuransi.

- e. Perusahaan Asuransi Pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).
- f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS berdasarkan rekapan polis dari Perusahaan Pelaksana dan disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik setiap bulan
- g. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara periodik setiap bulan.
- h. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing

Provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- i. Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- j. Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak kepada perusahaan asuransi pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.<sup>4</sup>

### **C. Prosedur Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung**

#### **1. Pengajuan Klaim**

Apabila sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan;
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang di asuransikan;

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Kpts/PK. 240/B/12/2107 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. yang merupakan rekomendasi untuk penulisan oleh bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAAIK selaku kepala unit teknik PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, yang penulis berkesempatan wawancara kepada beliau, pada tanggal 22 Maret 2019.

- c. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

Secara rinci persyaratan pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP tertanggung/peternak.
- 2) Foto copy polis asuransi/ sertifikat polis asuransi
- 3) Foto copy buku rekening kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi.
- 4) Formulir pemberitahuan kematian ternak.
- 5) Hasil Pemeriksaan/Visum dari Peskeswan (Petugas kesehatan hewan).
- 6) Foto-foto kematian.
- 7) Berita acara pemeriksaan kematian sapi (untuk pengajuan klaim sapi mati).
- 8) Berita acara pemeriksaan kehilangan sapi (untuk pengajuan klaim sapi hilang).
- 9) Surat kehilangan dari kepolisian.<sup>5</sup>

## 2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*claim notification*)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, *facsimile*, atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi Penanggung.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAAIK selaku Kepala Unit Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, pada tanggal 2 April 2019.



### 3. Pengendalian kerugian

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai kematian sapi

### 4. Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)

Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung.

### 5. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Risiko yang dimaksud adalah untuk sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan. Yaitu 30% dari Rp. 10.000.000,- = Rp. 7.000.000,-.

### 6. Klaim

- a. Kematian sapi, dalam hal terjadi kematian sapi Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim dengan menyertakan berita acara kematian ternak.

- b. Kehilangan sapi, dalam hal terjadi kehilangan sapi Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjut Tertanggung membuat laporan klaim.

#### 7. Persetujuan Klaim

Perusahaan Asuransi melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau kehilangan, dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Berita Acara Hasil Kematian dan/atau Kehilangan.

#### 8. Pembayaran Klaim

- a. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim.
- b. Pelaksanaan klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer) ke rekening Tertanggung dalam hal ini adalah (buku rekening kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rm Rudi Afriyan, ST, AAAIK selaku Kepala Unit Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, pada tanggal 2 April 2019.

### **Pendapat para nasabah yang pernah mengajukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)**

Menurut hasil wawancara terhadap beberapa peternak yang pernah mengajukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), ditemukan Delapan (8) hasil data yaitu sebagai berikut:

1. 9 Peternak (bapak Ngatimin, Daru, Tukirin, Maimun, Yanto, Dalim, Toni, Boniran, dan Eko) mengajukan klaim karena sapi dianggap mati, mendapatkan klaim sesuai dengan klaim yang diajukan, dan waktunya sesuai atau tidak lebih dari 14 hari.<sup>7</sup>
2. 3 Peternak (bapak Haryanto, Warnan dan Buyung) mengajukan klaim karena sapi dianggap mati, mendapatkan klaim sesuai klaim yang diajukan, dan waktunya lama yaitu lebih dari 14 hari.<sup>8</sup>
3. 2 Peternak (bapak Jame dan Agus) mengajukan klaim karena sapi mati alami mendapatkan klaim sesuai klaim yang diajukan, dan waktunya sesuai atau tidak lebih dari 14 hari.<sup>9</sup>
4. 1 Peternak (bapak Nain) mengajukan klaim karena sapi mati alami mendapatkan klaim sesuai klaim yang diajukan, dan waktunya lama yaitu lebih dari 14 hari.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ngatimin, Daru, Tukirin, Maimun, Yanto, Dalim, Toni, Boniran dan Eko yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapi di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haryanto, Warnan dan Buyung yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapi di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jame dan Agus yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapi di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nain yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapi di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

5. 3 Peternak (bapak Encam, Junaedi dan Susilo) mengajukan klaim karena sapi hilang, mendapatkan klaim sesuai klaim yang diajukan, dan waktunya sesuai atau tidak lebih dari 14 hari.<sup>11</sup>
6. 1 Peternak (bapak Priyatno) mengajukan klaim sapi mati, dan 3 Peternak yaitu (bapak Iwan, Mursidi dan Karyanto) mengajukan klaim sapi hilang, tetapi belum mendapatkan kabar dari Kokter (ketua kelompok ternak).<sup>12</sup>
7. 2 Peternak (bapak Sukendar dan bapak Sudarman) mengajukan klaim sapi hilang, menurut kabar dari ketua kelompok sudah diserahkan ke dinas peternakan.<sup>13</sup>
8. 3 Peternak (bapak Muhidin, Samsul dan Salim) mengajukan klaim sapi mati alami, 2 Peternak (bapak Muhaimin dan Sugus Antoni) mengajukan klaim sapi dianggap mati, datanya dikembalikan karena foto sapinya tidak ada *eartag* atau tanda pengenal bahwa sapi tersebut adalah sapi yang diasuransikan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Encam, Junaedi dan Susilo yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapinya di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Priyatno, Iwan, Mursidi dan Karyanto yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapinya di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukendar dan bapak Sudarman yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapinya di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhidin, Samsul, Salim, Muhaimin dan Sugus Antoni yang merupakan peternak yang mengasuransikan sapinya di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret – 3 April 2019.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **A. Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.**

Asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara penanggung (Lembaga Asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian risiko atau kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam hal ini adalah peternak sapi. Dalam pelaksanaannya, risiko atau kerugian yang mana sapi tersebut mati dan/atau hilang.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko ternak sapi mereka yang mungkin timbul dikemudian hari. Sementara pihak penanggung berupaya mengumpulkan dana dari nasabah/peternak melalui pembayaran premi yang wajib dibayarkan oleh tertanggung setiap tahunnya untuk satu ekor sapi.

Pihak tertanggung dalam hal ini berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang mendasari program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Setelah premi dibayarkan oleh tertanggung dalam hal ini adalah peternak, maka peternak bisa mengajukan klaim kepada penanggung

dalam hal ini yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung, bilamana terjadi kematian atau hilang pada sapi tertanggung.

Klaim adalah sebuah permintaan resmi tertanggung kepada penanggung/perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Dengan syarat, tertanggung yang mengajukan klaim kepada pihak penanggung harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penanggung. Dan pihak penanggung berkewajiban mengabulkan klaim yang telah diajukan oleh pihak tertanggung sesuai dengan polis asuransi.

Menurut hasil wawancara penulis dan sudah dituangkan dalam bab III. Adapun persyaratan untuk mengajukan klaim asuransi usaha ternak sapi adalah:

- 1) Foto copy KTP tertanggung/peternak;
- 2) Foto copy polis asuransi/ sertifikat polis asuransi;
- 3) Foto copy buku rekening kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi;
- 4) Formulir pemberitahuan kematian ternak (untuk pengajuan sapi mati);
- 5) Hasil Pemeriksaan/Visum dari Peskeswan (Petugas kesehatan hewan);
- 6) Foto-foto kematian;
- 7) Berita acara pemeriksaan kematian sapi (untuk pengajuan klaim sapi mati);
- 8) Berita acara pemeriksaan kehilangan sapi (untuk pengajuan klaim sapi hilang); dan
- 9) Surat kehilangan dari kepolisian;

Perbedaan dalam sistem klaim asuransi usaha ternak sapi, jika sapi tersebut mati atau hilang terdapat pada persyaratan pengajuan klaim asuransi usaha ternak sapi. Sedangkan dalam mekanisme pelaksanaan atau prosedur pengajuan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi sama saja, berikut adalah prosedur pengajuan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS):

1. Perternak/kelompok ternak memberitahukan kematian/kehilangan sapi, serta membawa berita acara kematian/kehilangan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota;
2. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian sapi;
3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota mengesahkan berita acara kematian/kehilangan sapi;
4. Perternak/kelompok ternak mengajukan pemberitahuan klaim kepada Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung);
5. *Loss Adjuster* (Penilai Kerugian) melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian sapi;
6. Verifikasi Dokumen; dan
7. Persetujuan dan Pembayaran.

Setelah disetujui klaim, maka langkah selanjutnya yaitu pembayaran, pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan



kerekening kelompok AUTS (Gapoktan), yaitu Rp. 10.000.000,- untuk sapi mati dan Rp. 7.000.000,- untuk sapi hilang.

**B. Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)**

Secara umum tujuan dibentuknya produk Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah membantu peternak sapi dalam mengurangi risiko atau mengalihkan risiko kerugian usaha ternak sapi yang mengalami kematian ataupun kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi, sehingga dengan adanya asuransi ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dapat membantu dan menolong keberlangsungan usaha ternak sapi yang ada di Indonesia. Tujuan ini selaras dengan tujuan hukum islam yaitu terciptanya kemaslahatan, kepentingan serta kebahagiaan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, baik individu maupun sosial dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau mengurangi segala risiko yang timbul dimasa yang akan datang.

Pada prakteknya baik Asuransi maupun Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menyebutkan hukum asuransi, karena pada masa Rasulullah tidak ada praktek asuransi sehingga tidak diatur secara jelas hukumnya. Oleh karena itu, untuk mengkaji hukum asuransi secara lebih rinci dan detail ditempuh dengan jalan ijtihad.

Untuk lebih jelas tentang hukum asuransi menurut hukum Islam yaitu yang dikemukakan oleh ulama fiqh yang dapat dilihat pada BAB II, yaitu pada pembahasan pandangan ulama tentang asuransi syariah.

Masalah hukum boleh atau tidaknya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ataupun Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang antara lain adalah sebagai berikut:

Kaidah fiqh yang pertama:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.*” Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu transaksi muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (mubah).

Kaidah fiqh yang kedua yaitu:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالُ

“*Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal*”. Pada kaidah ini jelas Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Dalam hal ini pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Islam dan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Hukum boleh atau tidaknya Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sepenuhnya mengacu kepada kemanfaatan dari adanya klaim asuransi tersebut. Adapun kemanfaatan dari didapatnya klaim Asuransi

Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini adalah para peternak sapi merasa tertolong dengan adanya asuransi ini, mereka bisa bernafas lega dan tetap bisa melanjutkan usahanya apabila sapi mereka mati atau hilang. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa dengan adanya Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), peternak dapat terjamin kehidupannya setelah sapi mereka mati atau hilang dan mereka dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang timbul. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maaidah [5]: 2).*

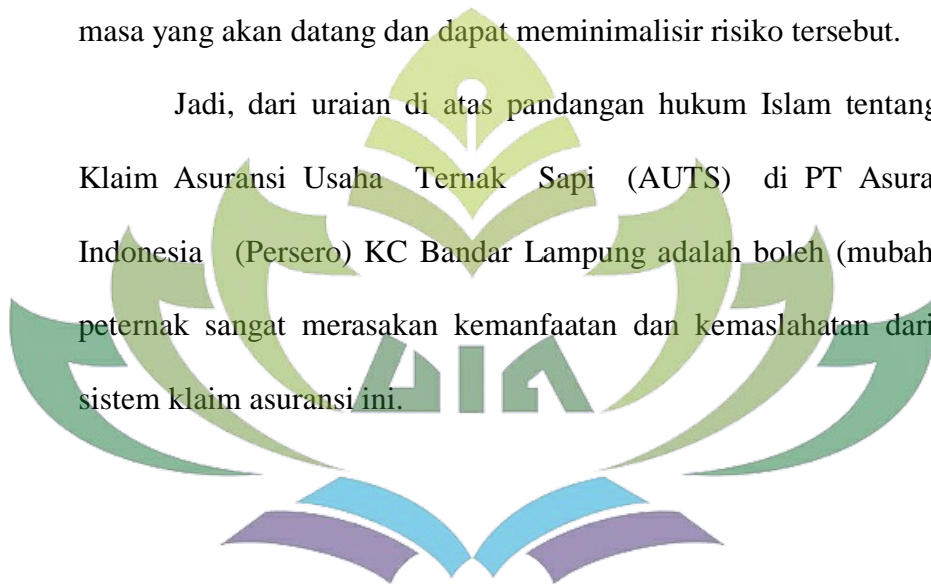
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).*

Hal ini pun selaras dengan kaidah ushul fiqh *Al-Maslahah Al-Mursalah*. *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak

ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang kemaslahatan tersebut. Dalam asuransi sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada hukum *syara'* atau dalil yang jelas menerangkan bahwa asuransi itu halal dan begitupun sebaliknya, tidak ada hukum *syara'* atau dalil yang jelas menerangkan bahwa asuransi haram, tetapi melihat dari segi *Maslahah Mursalah* asuransi tentu ada kemaslahatannya seperti: tolong menolong, dapat terjamin kehidupannya dari risiko yang timbul di masa yang akan datang dan dapat meminimalisir risiko tersebut.

Jadi, dari uraian di atas pandangan hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung adalah boleh (mubah) karena peternak sangat merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan dari adanya sistem klaim asuransi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan setelah dianalisa maka pada bab ini ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), apabila sapi yang diasuransikan mati atau hilang; pertama, peternak/kelompok ternak memberitahukan kematian/kehilangan sapi, serta membawa berita acara kematian/kehilangan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, setelah itu Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian sapi, langkah selanjutnya baru lah peternak/kelompok ternak mengajukan pemberitahuan klaim kepada Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung) dengan membawa persyaratan-persyaratan untuk mengajukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) seperti: Foto copy KTP tertanggung/peternak, Foto copy polis asuransi/ sertifikat polis asuransi, foto copy buku rekening kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), formulir pemberitahuan kematian ternak (untuk pengajuan sapi mati), hasil Pemeriksaan/Visum dari Peskeswan (Petugas Kesehatan Hewan), foto-foto kematian, berita acara pemeriksaan kematian sapi (untuk pengajuan klaim sapi mati), berita

acara pemeriksaan kehilangan sapi (untuk pengajuan klaim sapi hilang) dan surat kehilangan dari kepolisian, setelah asuransi pelaksana menerima berkas pengajuan klaim tersebut, asuransi pelaksana menunjuk *Loss Adjuster* (Penilai Kerugian) melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian sapi, baru setelah itu asuransi pelaksana melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan tersebut, apabila klaim disetujui maka langkah selanjutnya yaitu pembayaran, pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan ke rekening kelompok AUTS (Gapoktan), yaitu Rp. 10.000.000,- untuk sapi mati dan Rp. 7.000.000,- untuk sapi hilang.

2. Pandangan hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung adalah boleh (mubah) karena ada manfaat dan kemaslahatan yang dirasakan oleh peternak (peserta asuransi). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang secara istilah *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang kemaslahatan tersebut maka Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini hukumnya adalah boleh (mubah) karena dengan adanya perlindungan dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung kepada peternak (peserta asuransi), peternak sangat

merasakan manfaat dan kemaslahatan dari adanya Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

## **B. Saran-Saran**

1. Sesuai dengan perjanjian antara pihak penanggung dengan tertanggung dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung hendaknya lebih meningkatkan kredibilitas dan pelayanannya, termasuk dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan kepentingan peternak sapi. Sehingga jangan sampai citra yang telah lama dibangun menjadi jelek karena kurangnya pelayanan dan penyampaian informasi yang kurang memuaskan nasabah atau peternak sapi.
2. Kokter (Koordinator Kelompok Ternak) yang memegang buku rekening Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani/Ternak) harus jujur dan amanah dalam memberikan informasi dan klaim asuransi tersebut, sehingga klaim tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Bairut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Ahmad, Saebeni Beni, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Iman Abi Zakariya Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhomasqi, *Syarah Shahih Muslim: di Tahqi’ oleh Ngimad Zakiy Al-Barudiy*, Juz 17, Mesir: Al-Makhtabah Al-Thaufiqiya, 2008.
- Arikounto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: spesial for woman*, Jakarta: Syaamil, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Fachruddin, Fuad Mohammad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1985.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Firdaus, Muhammad dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hasan Baharudin dan Syafiqiyah Adhimiy (2018). *Litimasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat dalam Prespektif Mashlahah Mursalah*, dalam jurnal *Al- ‘Adalah* Vol. 15, Nomor 1, h. 158. (Online), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> di akses pada tanggal 04 Maret 2019, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

Ismanto, Kwat, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Khairandy, Ridwan, *Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua Revisi Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Kpts/PK. 240/B/12/2107 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

-----, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Muhamad, AbdulKadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010.

Muhaimin, Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Muhammad Ma'sum Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur-Malaysia: IIUM Press, 2001.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Ahli Bahasa oleh Zainuddin, Widjaya, Jakarta: 1992.

M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, UMS Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Saharuddin, Desmadi, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, CV. Asy-Syifa', Juz 9, Semarang: 1993.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Syakir Sula, Muhammad, AAIJ. FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

<https://www.jasindo.co.id/tentang-kami/riwayat.>, di akses pada tanggal 22 Maret 2019, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.